

Afkar, Vol. VI No. 1 /1999

REDISTRIBUSI ASET PRODUKTIF: DARI KONSENTRASI EKONOMI MENUJU EKONOMI RAKYAT

R. HENDRA HALWANI

Kecenderungan kosentrasi ekonomi di tangan segelintir orang (konglomerat) telah membuat ekonomi Indonesia berjalan pincang. Kecenderungan tersebut dijustifikasi oleh paradigma ekonomi Orde Baru yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, kegiatan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan sektor pertanian menjadi pelengkap penderita selama puluhan tahun. Setelah krisis ekonomi mendera tanah air, justru kegiatan di sektor inilah yang menjadi "bantalan pengaman". Dalam konteks ini memang diperlukan kebijakan pemihakan. Tulisan ini mencoba melakukan pembedahan terhadap kebijakan redistribusi aset produktif yang merupakan representasi dari kebijakan pemihakan yang dimaksud.

Memasuki kuartal pertama tahun 1999, kondisi perekonomian masih tetap dibayangi oleh situasi ketidakpastian. Walaupun sederatan kebijakan ekonomi dan politik telah dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan untuk dapat memulihkan keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. Namun hingga kini penguatan ekonomi masih

TINJAUAN

terlihat samar samar dan belum ada tanda tanda yang cukup signifikan yang dapat menunjukkan bahwa ekonomi kita mulai pulih secara fundamental, walaupun kebijakan ekonomi secara makro sudah berjalan pada arah yang tepat, dan rupiah sudah bertengger pada angka yang dapat diterima (*reasonable*), demikian pula dengan kecenderungan menurunnya tingkat bunga maupun tingkat inflasi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Runyamnya sektor perbankan yang merupakan jantung roda ekonomi juga masih tetap buram, dan semakin memburuk, bahkan sudah masuk pada kondisi terburuk jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, walaupun upaya rekapitalisasi dan likuidasi telah dilakukan pemerintah.

Situasi yang tidak menguntungkan dan masih penuh dengan ketidakpastian tetap melingkari kita, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi, pemilu bulan Juni mendatang. Gejolak politik dan arus demo terus menggelinding sejalan dengan kegembiraan (*euphoria*) demokrasi dalam era reformasi. Kabinet Reformasi Pembangunan memasuki era yang paling sulit sepanjang sejarah pembangunan nasional. Pemerintah memikul beban persoalan jangka pendek yang sangat berat, di mana kini sudah menggumpal menjadi satu antara persoalan ekonomi dan non ekonomi. Sehingga masyarakat hanya bisa berharap dan bertanya sampai kapan kita akan terus begini.

Di antara kompleknya persoalan internal yang harus segera diatasi ini, kita juga sedang dihimpit dengan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan keterbukaan pasar dunia terutama dalam menyongsong era globalisasi perdagangan dan investasi, untuk AFTA (tahun 2003), APEC (2010) dan Pasar Global/ WTO (tahun 2020).

Pasar bebas memperlicin tingkat persaingan yang semakin tajam, telah siap menghadang dan memepetkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan, karena kita akan memasuki era pasar

TINJAUAN

bebas dan globalisasi ekonomi di mana kita masih bergulat dan berusaha keras untuk keluar krisis ekonomi.

Era liberalisasi ekonomi yang merupakan era penajaman daya saing bagi dunia usaha, sudah mulai mewarnai sebagian besar belahan dunia, di mana gelombang arus perdagangan, investasi, modal, dan perubahan teknologi secara bebas bergerak kekawasan kawasan yang menguntungkan secara ekonomis dan relokasi industri pun mengarah pada efisiensi sumberdaya yang paling menguntungkan bagi pelaku ekonomi.

Arus liberalisasi ekonomi yang telah mewarnai semua belahan dunia dengan iklim deregulasi yang bergerak dari kekuatan pasar negara maju menggiring ke arah kekuatan globalisasi *financial markets* yang mempermulus deregulasi pasar barang dan jasa. Diikuti dengan lompatan teknologi komunikasi dan informasi yang secara prinsip melemahkan kedaulatan nasional dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang terlalu berbasis nasional. Terutama bagi Indonesia yang kini sedang mencoba dengan perwajahan baru melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Keadaan yang demikian menghantarkan pemerintah Indonesia pada sisi yang rentan terhadap tekanan globalisasi karena kecepatan pergerakan modal dan arus penajaman daya saing akan siap menohok kita dari segala penjuru.

Momentum Historis

Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,02 persen pertahun selama tiga puluh tahun, telah membuat pelaku ekonomi dan para pengambil keputusan (pemerintah) semakin percaya dengan putaran roda sektor swasta sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi (*locomotive of growth*). Pertalian erat para pengambil keputusan dikalangan pemerintahan dan pelaku ekonomi yang mengental, dan secara berlebihan memperkuat akumulasi modal serta ekspansi ekonomi

TINJAUAN

yang luar biasa hingga gurita konglomerasi menjarah hampir kesemua jenis dan lapisan usaha.

Kecanggihannya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini didongkrak oleh arus modal luar negeri yang masuk (*capital inflow*) dalam jumlah besar dan pada saat yang sama dibarengi oleh eksploitasi sumber daya alam secara luar biasa hingga pemerasan tenaga kerja buruh yang jumlahnya membludak, telah menggiring usaha konglomerasi dapat berjalan melenggang lenggok dengan gagahnya.

Konglomerat yang selama ini dipandang bukan merupakan suatu sistem yang dianggap dapat mendominasi dan memonopoli ekonomi, tetapi justru dipandang sebagai fondasi usaha yang bercirikan "*diversified*" yang dijadikan bulldoser untuk mendobrak pasaran luar negeri, sehingga konglomerasi didudukkan sebagai suatu kegiatan usaha yang berorientasi pada pasar global (*externally oriented*).

Maka dengan demikian pemerintah Indonesia secara sengaja meleluaskan gerak konglomerasi, karena diyakini konglomerasi ini merupakan pendongkrak kegiatan usaha seperti yang dijelaskan oleh Oliver E. Williamson yang mengatakan bahwa dengan melalui oligopoli yang terintegrasi, maka biaya transaksi dapat ditekan. Setiap usaha bisnis, keuntungan adalah sasaran pokok diperoleh melalui suatu kegiatan, yaitu transaksi. Dalam hubungan ini Michael E. Porter mengatakan bahwa kekuatan yang dihimpun untuk menjamin terlaksananya transaksi, yaitu yang diawali dengan perjuangan untuk mendapatkan kesempatan melakukan transaksi dan kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban mengisi kebutuhan transaksi yang lazim disebut dengan mengamati pasar, memasuki pasar, merebut pasar dan kemudian *mengisi pasar* hingga terlanggengkannya *penguasaan pasar* diarena internasional.

Pemerintah telah menyuburkan berkembangbiaknya perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan oligopoli. Karena diyakini

TINJAUAN

bahwa oligopoli maupun konsentrasi kekuatan merupakan awal membiaknya konglomerasi. Dengan selimut bahwa konglomerat merupakan usaha yang paling efisien, kompetitif dan produktif. Sehingga sebagian besar para pendukung teori biaya transaksi, pada umumnya bersikeras dan sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha konglomerasi.

Bahkan Schumpeter dalam teorinya percaya bahwa penggerak utama pembangunan serta perkembangan ekonomi dan bisnis adalah kaum pengusaha (*entrepreneur*), di mana pemerintah hanya sebagai pencipta iklim yang kondusif dan pendorong aktif dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi dan melanggengkan proses deregulasi ekonomi dan perdagangan. Sedangkan *entrepreneur* melakukan inovasi yang meliputi penciptaan barang, penemuan sumber, pembukaan pasas, pengenalan metode dan organisasi manajemen yang baru/inovatif. Sehingga jika di tinjau dari sudut keterbukaan pasar internasional, maka keberadaan dan sepak terjang usaha konglomerat menjadi andalan.

Namun pandangan lain yakni, Robert Solow, mengatakan bahwa konglomerat merupakan fenomena yang berbahaya serta dapat menghancurkan efektifitas manajemen serta rasionalitas organisasi. Senada dengan Solow, ekonom lainnya, yakni Harlan W. Blake, melihat konglomerat sebagai sesuatu kegiatan yang membahayakan kompetisi disetiap jenis usaha disebagian besar kawasan. Oleh karena itu keduanya memaksakan adanya undang-undang anti trust, anti monopoli dan undang undang persaingan yang fair.

Pemerintah Orde Baru dengan sadar telah menjadi pengawal dari penguatan konsentrasi ekonomi yang menciptakan struktur industri yang oligopolistik dan monopolistik yang sangat merugikan konsumen dan memberikan keuntungan sangat besar pada sejumlah kecil produsen. Sehingga pola konglomerasi yang mengurita ternyata tidak sesuai dengan teori teori pendukung usaha konglomerasi yang ada di negara negara lainnya. Dan yang terjadi

TINJAUAN

di Indonesia justru konglomerasi telah beroperasi secara tidak efisien, dan sebatas tukang jahit, tukang rakit dan hanya handal di tingkat lokal.

Sederetan kebijakan industri juga diskriminatif terhadap usaha menengah dan kecil telah terbangun dengan suburnya. Struktur industrinyapun sangat timpang dan vulnerable terhadap shock ekonomi. Keberpihakan pemerintah Orde Baru pada usaha konglomerasi telah mewariskan kesengsaraan pada rakyat Indonesia.

Konsentrasi ekonomi oleh segelintir pelaku ekonomi kelas kakap di era pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar, terutama antar pelaku ekonomi, antar sektor maupun antar wilayah. Konsentrasi ekonomi melalui kekuatan monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, kartel dari hulu hingga hilir baik itu merupakan penguasaan input, output, distribusi hingga penguasaan pasar dari berbagai komoditi dan jasa telah menyebabkan masyarakat konsumen menjadi korban eksploitasi, pengusuran lahan, penggilasan usaha dan penjarahan sistematis oleh pengusaha besar. Konsumen dan masyarakat produsen kecil tidak mempunyai kekuatan tawar untuk mempengaruhi harga dan kualitas yang adil bagi kepentingan masyarakat banyak.

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia, yang kini telah memasuki bulan yang ke duapuluh, telah menjungkalkan lebih dari 80 persen konglomerat dan swasta besar, secara teknis dan finansial telah bangkrut. Pendapatan perkapita anjlok dari US\$ 1230 pada tahun 1997 (sebelum krisis ekonomi) menjadi US\$ 400 saat ini, demikian pula dengan angka kemiskinan absolut membengkak dari hanya 11% atau sebesar 22 juta orang (sebelum krisis) menjadi 39,10 % atau 80 juta orang (ILO, 1998).

Malapetaka kehancuran era konglomerasi saat ini, memperlihatkan strategi pembangunan ekonomi dari pemerintahan Orde Baru telah gagal membebaskan rakyat dari keterhimpitan, keter-

TINJAUAN

belakangan dan gagal untuk menghantarkan rakyat kegerbang yang sejahtera seperti diamanatkan dalam GBHN.

Dengan terjunjalnya ekonomi Indonesia, maka kekuasaan negara dalam bidang ekonomi mendadak menjadi sangat besar. Sehingga kekuatan ini merupakan momentum yang kuat untuk memacu ekonomi rakyat secara total. Keadaan yang terjadi saat ini dapat digambarkan sebagai momentum historis yang sangat tepat untuk membangkitkan ekonomi rakyat yang ditopang dengan redistribusi aset produktif.

Pemberdayaan

Dengan terpuruknya ekonomi kita, membuat struktur kekuatan dunia usaha mengalami pergeseran, Paradigma pembangunan masa lalu, yang menempatkan "pertumbuhan ekonomi" sebagai prioritas utama, sehingga membiakkan konglomerasi yang menggurita di segala bidang usaha, akhirnya hanya melahirkan pemain bertenaga lokal dengan struktur industri yang keropos.

Krisis moneter yang berkepanjangan ini telah menurijukkan bahwa konglomerasi ternyata tidak mampu bertahan. Sebaliknya koperasi, usaha kecil dan menengah yang selama ini merupakan sektor usaha pinggiran dan yang kurang mendapat perhatian, ternyata tetap bertahan dan berkembang bahkan melakukan terobosan ekspor.

Dalam kondisi ekonomi yang ruyam saat inilah muncul beberapa gagasan pemikiran untuk mereformasi dan merestrukturisasi secara nasional dunia usaha dengan pemberdayaan ekonomi rakyat secara total yang berbasis pada usaha skala kecil - menengah dan koperasi.

Sistem Ekonomi Rakyat adalah membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan, dengan peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang bercirikan dengan peningkatan penguasaan rakyat terhadap

TINJAUAN

faktor-faktor produksi, karena bagian terbesar penduduk Indonesia adalah para petani, nelayan dan usaha kecil yang harus diberikan prioritas untuk tumbuh berkembang.

Kesadaran perlunya kembali keberpihakan pada ekonomi rakyat tersebut telah mendapat sambutan hangat masyarakat. Arah pembangunan juga terlihat dari gebrakan yang difokuskan pada koperasi dan usaha kecil-menengah. Gebrakan ini lebih dilandasi keinginan tulus untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang secara bersamaan sulit dipisahkan dengan agenda politik dibelakangnya.

Optimisme pemerintah mengembangkan ekonomi rakyat ditengah tengah keterpurukan ekonomi nasional dapat dipahami. Oleh karena itu, krisis ekonomi sekarang ini tampaknya bisa dipandang merupakan momentum untuk "menata sistem ekonomi" yang terlalu liberal dan kembali pada perekonomian rakyat yang selama ini tersisihkan, tetapi mampu bertahan dan menjadi tulang punggung ditengah krisis ekonomi yang menggelembung menjadi krisis multidimensional dan berkepanjangan. Bahkan pemberdayaan ekonomi rakyat bakal menjadi bagian sentral dari program reformasi ekonomi.

Beberapa pemikiran lain juga mempertegas bahwa membangun daya saing nasional dalam menyongsong era pasar bebas, dipandang sudah tidak relevan lagi untuk mengandalkan konglomerat yang berbasis pada sektor modern, sehingga memunculkan pemikiran yang sifatnya melakukan rekonstruksi sistem ekonomi melalui restrukturisasi dan reorientasi dunia usaha, maupun reformasi ekonomi hingga proses transformasi dari konsentrasi ekonomi menuju paradigma baru yakni pemberdayaan ekonomi rakyat yang dimodifikasi dengan masukan teknologi, manajemen, pelebaran akses, peningkatan ethos kerja, perluasan ruang gerak, penajaman visi, penambahan porsi kredit. Debirokratisasi lembaga lembaga ekonomi rakyat pedesaan, peran aktif LSM dan organisasi

TINJAUAN

profesi serta asosiasi lainnya sebagai stimulator pemberdayaan masyarakat termasuk peningkatan kemampuan manajerial. Juga diperkuat dengan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada penguatan lembaga ekonomi rakyat, dan pembukaan akses melalui, peniadaan persyaratan agunan bagi kredit bank dan penyediaan fasilitas informasi pasar yang akurat. Penghapusan semua rezim tata niaga produk produk pertanian. Dibarengi dengan penghapusan semua praktek monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni dan penataan kembali asset produktif tanah dan ditopang oleh elemen penguat lainnya.

Pro dan Kontra

Dalam era reformasi ini pemerintah secara gencar sedang memberdayakan ekonomi rakyat sebagai jawaban atas kegagalan pemerintahan Orde Baru yang lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada kekuatan konglomerasi yang berkolusi dengan segelintir pengambil keputusan, pemegang elit politik dan ekonomi.

Pembenahan instrumen ekonomi secara total, walaupun tidak semata mata terletak pada kegagalan mekanisme pasar (*market failure*) tetapi lebih bertumpu pada kegagalan pengelolaan pemerintah (*government failure*) terutama yang dilakukan oleh pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pelaku pasar (*market actors*) yang membuat pasar terdistorsi.

Sejak puluhan tahun yang lalu pandangan pro dan kontra mengenai apakah mekanisme pasar otomatis menghasilkan konglomerat. Mekanisme pasar yang dibayangkan oleh Adam Smith yang berbicara mengenai *invisible hand*, *original market mechanism*, dipenuhi dengan rambu rambu yang menjelaskan bahwa memang *drive* manusia selalu tidak pernah puas. Namun kemudian dimunculkan rambu-rambu, agar mekanisme pasar tidak menciptakan akumulasi yang berlebihan.

TINJAUAN

Wawasan ekonomi rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru secara sengaja atau tidak telah menjungkirbalikkan profil perekonomian rakyat ini dalam konstelasi ekonomi nasional yang rapuh secara fundamental. Eksistensi ekonomi rakyat dimandulkan dari keberadaannya yang secara ideal sebetulnya dapat dijadikan sebagai pemain sentral dalam perekonomian. Walaupun senjata pamungkas Trilogi Pembangunan sudah dimainkan melalui penopang Delapan Jalur Pemerataan dan instrumen instrumen penyempitan kesenjangan seperti Kredit Usaha Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen, Kredit Investasi Kecil, Kredit Canda Kulak, Modal Ventura, IDT, Sistem Bapak Angkat, Pola Kemitraan, Program Pengentasan Usaha Kecil dan lain lainnya telah digulirkan. Namun kesemuanya ini yang nampak manis, ternyata hanya sebatas kosmetik pemerintahan Orde Baru.

Rasa ketidakadilan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat inilah yang memunculkan keinginan keras mengenai perlu adanya perubahan mendasar dari lemahnya struktur ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sektor modern ke arah rekonstruksi sistem ekonomi dan restrukturisasi dunia usaha yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Redistribusi Aset

Pada bulan Agustus tahun lalu pemerintah mengatakan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang segera dibangun adalah ekonomi rakyat. Selanjutnya dalam Musyawarah Nasional V Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) tanggal 10 Agustus 1998, Presiden Habibie mengulangi kembali dengan menegaskan bahwa tatanan ekonomi baru kedepan, disandarkan pada tiga prinsip pokok, yakni kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian. Dan puncaknya hari pada Sabtu, di Istana Negara, Presiden B.J. Habibie menyatakan, bahwa tanggal 17 Oktober 1998, merupakan hari Pencanangan Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Kemudian

TINJAUAN

hasil Sidang Umum MPR, yang melahirkan Ketetapan MPR No XVI 1998, mengenai Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dengan tekanan keberpihakan pada ekonomi rakyat.

Secara umum ekonomi rakyat dapat dijabarkan sebagai suatu sistem partisipatif yang memberikan akses fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat didalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Di mana merupakan suatu proses penyelenggaraan ekonomi yang berasal dari dan untuk semua rakyat Indonesia.

Membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan merupakan suatu arah yang harus dilakukan, apalagi bagian terbesar penduduk bumi tanah air ini terdiri atas barisan petani, nelayan, usaha kecil, pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya. Agar roda perekonomian berputar kembali sudah waktunya diberikan prioritas utama pada ekonomi rakyat untuk tumbuh berkembang. Dan pengembangan ekonomi rakyat, pemerintah harus menempatkan perubahan struktural dalam agenda utama dengan cara memperkuat kedudukan dan peran secara luas ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Adapun untuk mendukung terlaksananya pemerdayaan ekonomi rakyat maka pemerintah melakukan redistribusi sumber daya ekonomi nasional atau redistribusi aset produktif.

Pengertian Redistribusi Aset dalam konsep ekonomi kerakyatan bukanlah mendistribusikan aset phisik atau riil. Bukan pula membagi bagikan kegiatan bisnis para konglomerat baik yang sedang sekarat atau yang sudah bangkrut, dan juga bukan merupakan alat untuk memindahkan aset fisik dan kesempatan memperoleh rente ekonomi dari aktor aktor lama ke aktor baru.

Redistribusi aset, dapat diartikan sebagai usaha memberikan kelaluaasaan dan kesempatan yang adil kepada pengusaha kecil-menengah dan koperasi atas untuk melakukan kegiatan ekonomi

TINJAUAN

dan bisnis. Di mana kesempatan tersebut selama ini telah dijarah oleh segelintir pelaku ekonomi. Maka dengan demikian dibuatlah suatu pola mekanisme dan instrumen yang digunakan ditujukan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.

Aturan main dalam mengatur redistribusi aset tersebut didukung dengan UU Persaingan Sehat, dengan tiga elemen yakni: anti monopoli, anti kartel dan aturan tentang Persaingan Sehat. Karena sistem ekonomi pasar juga mensyaratkan level playing field, "suatu tatanan pasar dengan permainan yang dilakukan oleh pelaku yang setara kemampuannya" maka hanya dengan jalan demikian dapat terbangun situasi kompetisi yang sehat. Ekonomi rakyat akan menciptakan lingkungan dunia usaha yang lebih bersahabat, karena nuansa ketidakadilan yang mencolok akan terhapus dari benak rakyat, seiring dengan tercukupinya kebutuhan pokok hidup mereka. Ekonomi rakyat akan menciptakan kelompok masyarakat yang secara masal berdaya beli lebih tinggi, yang kemudian akan mendorong pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha besar, (Adi Sasono, 1998).

Dengan demikian Redistribusi Aset merupakan langkah tepat dalam melakukan koreksi total dan struktural agar sesuai dengan cita-cita awal pendiri republik ini. Dukungan secara total masyarakat dari berbagai kalangan merupakan syarat mutlak dapat terlaksananya agenda redistribusi aset ini.

Daya serap

Seberapa besar peran usaha kecil, menengah dan koperasi selama ini, dapat kita simak angka angka dibawah ini, di mana dari total jumlah usaha yang mencapai 33,5 juta, tidak kurang 33,4 juta atau 99,8 persen terdiri dari unit unit usaha kecil dan industri rumah tangga, sedangkan yang tergolong dalam usaha besar hanya mencapai 66.428 atau hanya sekitar 0.2 persen. Sedangkan posisi

TINJAUAN

konglomerat dilihat dari total aset mencapai Rp 650 triliun dengan total penjualan Rp 477 triliun, sementara aset BUMN yang bernilai Rp 312 triliun hanya mempunyai omset penjualan Rp 94 triliun dengan pangsa pasar hanya 17 persen.

Beberapa gelintir konglomerat menguasai pangsa pasar tidak kurang dari 58 persen, sedangkan puluhan juta unit usaha kecil hanya menguasai pangsa pasar kurang dari 8 persen. Sementara jumlah koperasi yang mencapai 52.206 unit dengan jumlah anggota yang menapai tidak kurang dari 29 juta orang, dengan omset hanya sebesar Rp 13 triliun.

Dilihat dari jenis usahanya, Koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan yang terbesar dalam struktur perekonomian nasional, yakni merupakan 99,8 persen dari total unit usaha, dengan menyerap kurang lebih 88 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Namun dalam penguasaan pangsa pasar dan pertumbuhan ekonomi, hanya mencapai masing-masing 20 persen dan 16 persen. Sedangkan jenis usaha besar dan konglomerat yang jumlahnya hanya merupakan 0,2 persen dari total unit usaha nasional, mampu menguasai pangsa pasar sebesar antara 70 hingga 80 persen. Usaha kecil-menengah dan koperasi ini mencapai tidak kurang dari 88 persen total angkatan kerja.

Koperasi merupakan pelaku ekonomi yang strategis jika dilihat dari jumlah koperasi sampai dengan tahun 1997 telah tercatat sebanyak 52.458 koperasi dengan keanggotaan sebanyak 19.23 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat cukup banyak sebagai respons atas dihapuskannya INPRES IV/1984 yang membatasi pendirian koperasi pedesaan di suatu daerah dengan memberlakukan INPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

Instrumen

Beberapa instrumen yang perlu mendapat tekanan lebih dalam adalah sebagai berikut:

Pertama: Menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang proporsional dalam skala usaha nasional.

Kedua: Keberpihakan pada akses pembiayaan melalui 17 Skim kredit harus dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Ketiga: Pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi yang ditopang melalui kebijakan redistribusi Hak Pemilikan lahan pertanian, Pengusahaan Hutan (HPH), Pertanahan Nasional, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan dan beberapa sektor lainnya dan pengalihan proyek proyek KKN harus segera diterapkan.

Keempat: Perluasan jaringan informasi melalui Pos Ekonomi Rakyat (PER) yang tersebar di seluruh Indonesia harus dapat berjalan seefektif mungkin guna menunjang jaringan informasi yang akurat dan tepat guna. PER ini ditujukan untuk menunjang usaha kecil, menengah dan koperasi yang kini mulai berkembang disemua bidang kegiatan usaha.

Maka dengan demikian arah utamanya adalah membalikkan piramida dari pelaku ekonomi dan bisnis dengan pangsa yang juga dalam posisi piramida terbalik. Upaya penciptaan struktur baru masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan masyarakat kelas bawah dan menengah ke tingkat dominan. Prinsip keadilan yang seadil-adilnya tetap dipakai untuk menjembatani proses pemulusan paradigma baru ini, sehingga kebijakan yang akan dilakukan tidak diskriminatif dan tidak ada yang merasa terlukai.

Ekonomi rakyat yang dituju adalah ditandai dengan:

1. Pembangunan ekonomi yang partisipatif dan menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang lebih besar serta pemberian peluang seluas luasnya yang didukung dengan pemihakan pada pelaku ekonomi rakyat sehingga dapat menggulirkan keseimbangan peran antar pelaku ekonomi dimasa depan.
2. Penyebaran atau perluasan kepemilikan aset ekonomi produktif ke tangan rakyat, atau agar dapat dipunyai oleh sebagian besar rakyat.
3. Penguatan sumber pembiayaan hingga terwujudnya ekonomi kesetaraan dan pengembangan secara total bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai potensi.
4. Menyebarnya kesempatan berusaha kepada ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi yang dalam kelanjutan proses produksinya dapat menciptakan inovasi, kreativitas, produktivitas dan penerapan teknologi dari yang paling sederhana hingga penciptaan nilai tambah yang berarti dan berdaya saing kuat.
5. Kemandirian ekonomi yang kokoh, tangguh dan penajaman daya saing serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana atau pinjaman dan produk, barang modal atau hingga bahan baku dari luar negeri.
6. Upaya kemitraan, kebersamaan, kekompakan dan kesetiakawanan antar pelaku ekonomi rakyat untuk penguatan dan penajaman daya saing, dalam menyongsong era glolalisasi ekonomi.
7. Kebijakan industri pemerintah lebih menitik beratkan pada pengembangan industri yang diarahkan pada pengembangan dan kekuatan industri rakyat yang saling mempunyai berkaitan dan ketergantungan dengan indus-

TINJAUAN

tri besar. Di mana kekuatan Industri rakyat secara keseluruhan ditempatkan pada posisi sentral dalam skala usaha nasional.

8. Kebijakan pengembangan industri dapat beriringan dari kawasan sekitar perkotaan dengan daerah pedesaan yang berbasis pada sumberdaya daerah yang bersangkutan untuk semua sektor ekonomi potensial yang ada. Sehingga dapat memperkuat kegiatan usaha ekonomi rakyat disegala kawasan dan daerah.
9. Kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang dinamis, berorientasi pada pembinaan kewirausahaan yang tangguh dan berpihak pada rakyat banyak, terutama dalam menggalang jumlah tenaga kerja yang membludak, sehingga dapat melahirkan tenaga kerja yang tahan banting dan bermental serta bersemangat wirausaha. Yang pada gilirannya akan melahirkan usahawan yang akan menggerakkan dan mengendalikan roda ekonomi rakyat.
10. Kedudukan ekonomi rakyat pada akhirnya merupakan salah satu kancah berwira usaha dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang luar biasa banyaknya, sehingga dapat memberikan manfaat secara luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Visi

Visi yang terlihat dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi adalah menjadikannya pengusaha unggul, modern dan berdaya saing agar mampu:

1. Mengisi dan mengembangkan aktivitas ekonomi mikro hingga ditingkat nasional secara maksimal hingga mendominasi kontribusi terhadap pendapatan nasional.

TINJAUAN

2. Menyerap tenaga kerja maksimal diseluruh sektor ekonomi dan menyumbang lebih dari tiga perempat terhadap pendapatan nasional.
3. Menjadi pelaku utama transformasi industri dari pertanian ke industri manufaktur menuju ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Belajar dari kekeliruan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru, maka untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis yang berkepanjangan ini, Kabinet Reformasi Pembangunan, khususnya Departemen Koperasi dan PKM meletakkan beberapa landasan pengembangan ekonomi rakyat, (Dep.Kop RI, 1998) di antaranya:

1. Berbasis pertanian, yaitu guna memenuhi kebutuhan pangan dan sandang secara swa sembada. Selain memberikan upaya yang serius terhadap pupuk dan penyaluran KUT, pemerintah melakukan dukungan total untuk mendapatkan komoditas yang dapat menjadi substitusi impor bagi kebutuhan sandang rakyat, serta terhadap pengembangan pertanian dengan tujuan ekspor kerana telah terbukti mempunyai ketangguhan dalam situasi krisis.
2. Berbasis sumber daya alam: Industri yang akan menjadi tumpuan adalah industri yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia di bumi pertiwi, sehingga sedapat mungkin tidak menggunakan kandungan impor.
3. Berorientasi ekspor,
4. Berbasis DT II, guna penyebarani kesempatan UKM Koperasi, diberdayakan satuan wilayah Dati II. Masing masing daerah tingkat II bertanggung jawab untuk mengenali komoditi unggulan diwilayahnya masing masing, dan jika dipandang perlu dapat didekati dengan konsep "one village one product" Dengan pendekatan komoditi ung-

TINJAUAN

gula masing-masing daerah perlu berupaya agar didapat kepastian pasar, bahan baku dan produksi. Dalam meningkatkan nilai tambah dan peningkatan produktivitas usaha, perlu dimanfaatkan teknologi tepat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya daerah yang bersangkutan.

Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul akibat krisis ekonomi, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah penyelamatan melalui program jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

Jangka pendek:

1. Program peningkatan produksi pangan

Peningkatan penanaman dan pengadaan pangan seperti: beras, jagung, kedelai dan hortikultura, yang didukung dengan pelaksanaan program percepatan penyaluran kredit KUT yang telah disediakan pemerintah sebesar Rp. 400 milyar.

2. Pengembangan distribusi sembako.

Dikembangkan jaringan usaha distribusi dan eceran bahan baku pokok melalui Koperasi.

3. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif.

Peran Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam (UK/KSP) akan lebih ditingkatkan sebagai alternatif pembiayaan murah untuk mengatasi kelangkaan permodalan yang disebabkan oleh krisis ekonomi.

4. Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil.

Pengangguran tenaga terampil merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk

TINJAUAN

lebih meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola kegiatan usaha.

5. Pengembangan Ekspor Produk Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Potensi UKM Kop. akan akan didorong dan dikembangkan sebagai usaha yang berperan dalam perekonomian nasional.

6. Rehabilitasi.

Rehabilitasi berbagai aspek pendukung berkembangnya UKM dan Koperasi sarana maupun prasarana meliputi:

- a). Perbaiki sarana distribusi khususnya dalam menunjang kelancaran penyaluran bahan pokok dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- b). Perbaiki tempat usaha serta penyediaan lokasi usaha. Terutama bagi UKM dan Koperasi. Yang mengalami kerugian akibat dampak kerusakan yang terjadi beberapa waktu lalu.

Program Jangka Menengah dan Panjang antara lain.

1. Peningkatan dan pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor, sebagai program kelanjutan yang dilakukan pada periode program jangka pendek.
2. Pengembangan produk unggulan di Dati II secara nasional.
3. Pengembangan peluang usaha pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha UKM Koperasi.
4. Pengembangan kemitraan dibidang manufaktur terutama kegiatan subkontrakting.

Sehubungan dengan pendekatan perekonomian seperti tersebut, maka strategi pemberdayaan usaha kecil, menengah dan

TINJAUAN

koperasi yang kedudukan sangat strategis dan sentral sekali karena mereka tersebar diseluruh pelosok tanah air yang dapat dijadikan kekuatan basis ekonomi rakyat tersebut dalam jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan dan usaha dari usaha kecil, menengah dan koperasi diberbagai sektor ekonomi.
2. Membangun lembaga Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang berbasis DT II, serta membangun inkubator, usaha bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi.
3. Melakukan indentifikasi produk unggulan disektor pertanian, menciptakan jalur distribusi alternatif dan pusat produksi baru.
4. Melakukan identifikasi produk unggulan disektor pertanian, menciptakan jalur distribusi alternatif dan pusat produksi baru.
5. Malakukan kerjasama dengan perbankan dan sumber sumber keuangan lain baik didalam negeri maupun diluar negeri untuk meningkatkan akses usaha kecil, menengah dan koperasi terhadap sumber sumber permodalan.
6. Membangun sumberdaya manusia yang kompatibel, melalui revitalisasi lembaga lembaga pendidikan seperti: IKOPIN, Akademi Koperasi dan Pusat Pusat Pelatihan

Memang akan sangat ideal, jika pembangunan ekonomi nasional, mempunyai basis industri dan jenis usaha ekonomi yang betul-betul dikuasai oleh rakyat, baik yang berskala kecil, menengah hingga yang besar. Di mana keseimbangan atas dasar kemampuan dari semua kegiatan usaha dari skala konglomerasi hingga ekonomi rakyat ini harus ditempatkan pada porsi yang layak dan dapat menjadikan primadona beriringan dengan kekuatan instrumen fiskal dan moneter. Kebijakannyapun harus diarahkan pada penopangan kekuatan multi demensi, mengandung cakupan

TINJAUAN

kombinasi proporsional dan aliansi strategis dari ekonomi modern dengan ekonomi rakyat. Sehingga ekonomi rakyat yang keduanya strategis tersebut secara ideal nantinya dapat menjembatani aneka distribusi kebutuhan pokok, sarana produksi, peningkatan produksi pangan, penyebaran kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Namun bagaimanapun usaha besar yang saat ini terpuruk tetap dibutuhkan untuk menjadi bagian dari lokomotif perekonomian nasional. Karena mereka diakui atau tidak selama ini telah memiliki jaringan pasar, hubungan partner nasional maupun internasional yang luas, memiliki pengalaman dan tahu seluk beluk rumitnya dunia bisnis selama bertahun-tahun. Sehingga mereka harus tetap didorong untuk terus maju dan menjadi besar, mandiri, kompetitif, dan menyadari serta mengoreksi kesalahan masa lalu.

Pemerintah diharapkan bukan sekedar berupaya menyanangkan hati rakyat. Tetapi harus bisa menjadikan kenyataan tanpa menimbulkan ketidak stabilan dunia usaha secara nasional akibat tidak adanya kepastian berusaha secara sehat dan perlakuan yang kental dengan diskriminasi.

Pengembangan ekonomi rakyat yang utuh nampaknya harus melalui prakondisi, diantaranya adalah :

1. Persiapan, pembenahan dan pematangan serta penigkatan kualitas sumberdaya manusia, yang meliputi:
 - a. Penajaman visi,
 - b. Pengokohan ethos kerja,
 - c. Penguatan kultur,
 - d. Kerakusan ber-inovasi secara dinamis,
 - e. Pekerja keras (workholic), berani mengambil resiko,
 - f. Keserakahan dan kehausan berwirausaha.
2. Penciptan Iklim usaha dan investasi yang kondusif dan bersahabat.
3. Pola pergeseran perilaku ekonomi.

TINJAUAN

4. Penguatan kelembagaan dan dukungan antar departemen terkait.
5. Pembenahan dan penempatan Infra dan suprastruktur yang tepat.
6. Penguasaan teknologi tepat guna, dan sebaran industrialisasi
7. Peletakan dasar dan kekokohan asumsi non diskriminatif,
8. Proses transformasi dari ekonomi modern ke ekonomi rakyat,
9. Kesepakatan yang elok dari pengambil kebijakan
10. Dukungan masyarakat secara total.

Prakondisi diatas harus dipersiapkan dan diproses secara matang, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang ditopang oleh redistribusi aset produktif dari konsentrasi ekonomi menuju ekonomi rakyat dapat terwujud. ■